



RENCANA KERJA TAHUN 2021

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jalan Sugiman No. 03 Wates Kulon Progo Telp./Fax.
(0274)773026

Email : dinsos@kulonprogokab.go.id
Website : dinsos.kulonprogokab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 dapat kami susun. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan sekaligus sebagai dokumen program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 246/A/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 serta dengan memperhatikan isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, tema dan prioritas pembangunan tahun 2020.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Kerja Dinas ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan guna penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dan karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan tugas di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wates, 13 Agustus 2020

Kepala Dinas

Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	1
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capain Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA.....	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	53
3.3. Program dan Kegiatan	53
BAB. IV PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 (Tahun Berjalan) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	8
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Program Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 (Perubahan).....	20
Tabel 2.2.2	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Tahun 2019.....	21
Tabel 2.2.3	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik dan Kualitas SDM OPD Tahun 2019.....	21
Tabel 2.2.4	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik dan Kualitas SDM OPD Tahun 2019.....	22
Tabel 2.2.5	Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2019.....	23
Tabel 2.2.6	Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2019.....	24
Tabel 2.2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo.....	26
Tabel 2.2.8	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2019.....	28
Tabel 2.2.9	OPD Yang Telah Melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2019.....	30
Tabel 2.2.10	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2019.....	32
Tabel 2.2.11	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2019.....	33
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten	

	Kulon Progo	40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial PPPA Tahun 2021	53
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial PPPA Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	55
Tabel 3.3	Usulan Belanja Bantuan Hibah Bansos Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Angka Partisipasi Kerja Perempuan Tahun 2014 – 2019 31
Grafik 2. Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019
Kabupaten Kulon Progo 34

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berpedoman pada Renja Dinas Sosial DIY, DP3AP2 DIY dan Renja Kementerian Sosial dan Renja kementerian PPPA.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2021 didasarkan pada Perubahan Renstra 2017-2022 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun ke-4 perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPJMD 2017-2022. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPPA serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, Aman, Tentram, Berkarakter, dan Berbudaya berdasarkan iman dan takwa**".

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Telaah terhadap rancangan awal OPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
11. Pembahasan forum OPD
12. Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Hangka Menengah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019.
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon progo Tahun 2021.
15. Keputusan Bupati Nomor 276/A/2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA di susun dengan maksud Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta untuk mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

2. Tujuan : a) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah;
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran 2021 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2021,
- c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.
- d) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memuat :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu (reviuiw) dan Capaian Renstra OPD

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini diuraikan tentang:

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang mejadi prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA tahun 2021

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mendukung pencapaian misi yang ke- 2 Daerah, yaitu **Menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan prioritas daerah “Peningkatan pendapatan masyarakat”** Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun fungsi dan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021 melaksanakan 7 program, dan 23 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Sosial
 - a) Peningkatan Kualitas Pelayanan PMKS
 - b) Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana
 - c) Penjangkauan dan Pelayanan Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - a) Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - b) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelayanan Sosial Bagi PMKS
 - c) Peningkatan Pelayanan PKH
 - d) Peningkatan Kapasitas PSKS
 - e) Peningkatan Pelayanan Bantuan Sosial Pangan
 - f) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran

- b) Penyediaan Jasa Keuangan
- c) Penyediaan Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi
- 4 Program Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
 - a) Penyusunan Perencanaan kinerja OPD
 - b) Penyusunan Laporan Keuangan
 - c) Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
- 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
- 6 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
 - a) Pemberdayaan lembaga berbasis gender
 - b) Peningkatan Peran wanita
 - c) Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - d) Penguatan Pengarusutamaan Gender
- 7 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a) Pembinaan Kabupaten Layak Anak
 - b) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Evaluasi kinerja dan keuangan Renja OPD Tahun 2019 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja Tahun 2019 yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2019. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2019, sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan Dan Anak dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau berdasarkan atas hasil capaian indikator standar kebutuhan pelayanan. Hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2017-2022 (Perubahan)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja	
			Target 2019	Realisasi 2019
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100
2.	Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan Kualitas SDM OPD	%	100	100
3	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	%	100	100
4	Indeks Perlindungan Sosial	%	84,00	84,14
5	Indeks Pemberdayaan Sosial	%	84.06	43.30

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran merupakan indikator untuk program pelayanan administrasi perkantoran, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam satu tahun x 100%

Tabel 2.2.2
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1.	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12	12
2.	Jumlah bulan dalam satu tahun	12	12
3.	Capaian Indikator Kinerja	100	100

2) Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD
Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD merupakan indikator untuk program Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut :

(Persentase aset kondisi baik + Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat)/2

Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat = Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) / Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)

Tabel 2.2.3
Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1.	Jumlah asset kondisi baik tahun ke-n	27	27
2.	Jumlah keseluruhan asset tahun ke-n	27	27
3	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop,	5	5

	peningkatan kemampuan sendiri (PKS)		
4	Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	10	10
5.	Capaian Indikator Kinerja	100	100

1) Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

Capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja merupakan indikator untuk program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut :

Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD

((Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu))/3

Tabel 2.2.4

Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu	3	3
2.	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja OPD)	3	3
3	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	14	14
4	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan OPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan OPD, 2 dok SPIP)	14	14
5.	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)	16	16
	Capaian Indikator Kinerja	100	100

4) Indeks Perlindungan Sosial

Indeks Perlindungan Sosial merupakan indikator untuk Program Perlindungan Sosial, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$((PSKS \text{ yang memperoleh bantuan jaminan sosial} / \text{Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial}) \times 70\%) + ((\text{Jumlah tagana aktif} / \text{Jumlah tagana}) \times 30\%)$

Tabel 2.2.5
Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2019

Baru

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1.	PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial	50.554	50.688
2.	Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial	65.536	65.536
3.	Jumlah tagana yang aktif (piket, apel dan Verifikasi Akhir Tahun)	155	155
4.	Jumlah tagana	155	155
	Capaian Indikator Kinerja	84.00	84.14

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2019 tercapai 84,14 melampau dari target yang ditetapkan sebesar 84,00 atau tingkat capaian dari realisasi terhadap target 100.27%. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Jaminan Sosial dari target 50.554 tercapai 50.688.

TAGANA (Taruna Siaga Bencana) telah terbentuk Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2007 mereka adalah relawan yang membantu dalam mengevakuasi dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Jumlah Tagana yang ada sebanyak 155 orang Bencana alam memerlukan perhatian yang ekstra dan serius, karena bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya sehingga diperlukan manajemen penanggulangan bencana yang baik, komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan terarah, serta sinergi semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak bencana. Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo telah terjadi sebanyak 89 kejadian bencana (tanah longsor 28 titik kejadian, angin ribut 38 titik kejadian, kebakaran 13

titik kejadian, banjir 1 kejadian). kejadian bencana tersebut semuanya telah diberikan bantuan. Selain bencana diatas juga terjadi bencana kekeringan yang terjadi di 9 kecamatan yaitu di Kecamatan Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Kokap dan Kecamatan Sentolo, Lendah, Wates. Dikarenakan bencana kekeringan makin meluas maka pemerintah daerah pada bulan september menerbitkan SK Tanggap Darurat kekeringan dengan Nomor 311/B/2019. Penyaluran air bersih telah dilakukan dengan droping air dengan total 993 tangki air @5000 liter untuk dimanfaatkan kepada 27.583 jiwa.

5) Indeks Pemberdayaan Sosial

Indeks Pemberdayaan Sosial merupakan indikator untuk Program Pemberdayaan Sosial, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut:

(jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sosial sejenis/Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis)x100%.

Tabel 2.2.6
Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2019

Baru

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1.	PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	8.849	9.565
2.	Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	22.090	22.090
	Indeks Pemberdayaan Sosial	40.06	43.30

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2019 mencapai 43,30 dari target yang ditetapkan sebesar 40,06. PMKS ang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan konomi sosial sejenis sebesar 8.849 target di tahun 2019 dan realisasi 2019 sebesar .565. sehingga realisasi melampau target. Akumulasi KUBE tahun sebelumnya yang ada sebanyak 8.576 orang ditambah dengan Pemberdayaan melalui KUBE yang

bersumber dari APBD pengembangan 1 kelompok (10 orang), APBN Pengembangan 20 kelompok (200 orang), dana Dekonsentrasi 60 kelompok (600 orang) dan BKK graduasi 179 KPM. sehingga realisasi tahun 2019 sebanyak 9.565 orang.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui:

- 1) Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dengan Indikator Kinerja Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG/jumlah OPD)x30)+(Jumlah desa yang melaksanakan PUG/jumlah desa)x25)+(jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif/jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada)x25)+(jumlah pekerja perempuan/jumlah angkatan kerja perempuan)x20).

Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.8
Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2019

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	30	34
2	Jumlah OPD	42	42
3	Jumlah Desa yang melaksanakan PUG	-	4
4	Jumlah Desa	87	87
5	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif	34	34
6	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada	34	34
7	Jumlah pekerja perempuan	115.515	115.636
7	Jumlah angkatan kerja perempuan	151.000	150.415
	Capaian indikator kinerja program	61.73	65.81

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender tahun 2019 dari target 61.73 tercapai sebesar 65.81. jadi tingkat capaian realisasi terhadap target 106.60% Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender, Peningkatan Peranan Wanita, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu, Penguatan Pengarusutamaan Gender, dan Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak. Target OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2019 adalah 30, tercapai 34 OPD. Pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Peningkatan Peranan Wanita, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan Industri Rumahan dengan sasaran 80 orang perempuan pelaku Industri Rumahan yang berada di 5 (lima) desa dan pada tahun 2019 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 5 (lima) desa tersebut yaitu :

- a. Desa Ngentakrejo , Kecamatan Lendah,
- b. Desa Bumirejo Kecamatan Lendah
- c. Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo
- d. Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, dan
- e. Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo Desa Pendoworejo

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi APE 2018 yang dilakukan adalah meningkatkan penerapan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan penyusunan perencanaan responsive gender dan anggaran responsive gender .
2. Menyusun kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
3. Pemberdayaan perempuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Peran serta Perempuan dalam Pembangunan tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Pemutakhiran data Pilah Gender dan Anak, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.9

OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2019

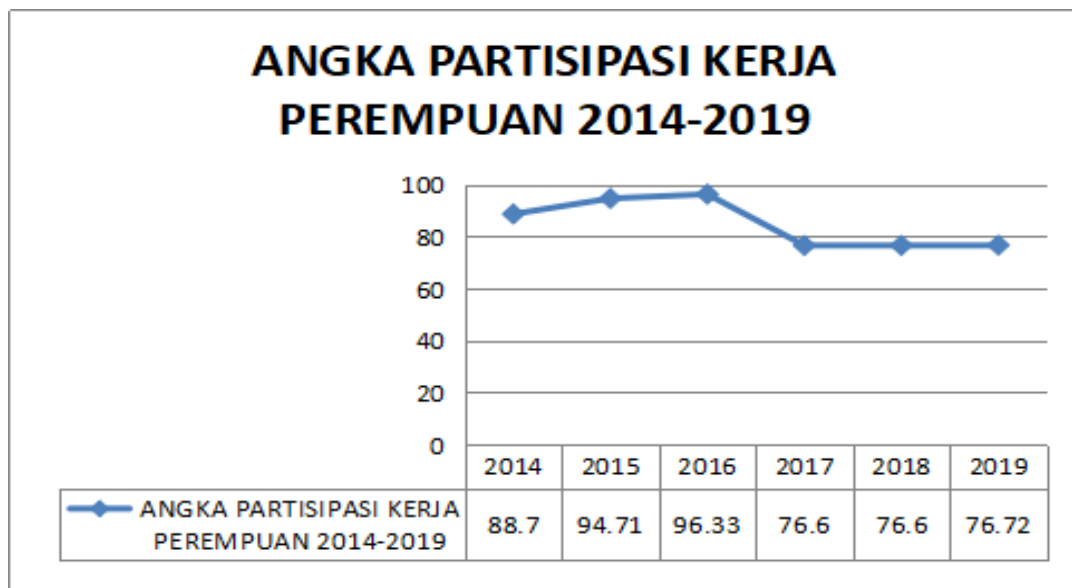
No	Nama Organisasi Perangkat Daerah		
1	Dinas Sosial PPPA	18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Dinas Kesehatan	19	Sekretariat DPRD
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	20	Inspektorat
4	Dinas Perhubungan	21	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	22	Badan Keuangan dan Asset Daerah
6	Dinas Kebudayaan	23	Kecamatan Samigaluh
7	Dinas Pariwisata	24	Kecamatan Kalibawang
8	Satuan Polisi Pamong Praja	25	Kecamatan Nanggulan
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	26	Kecamatan Girimulyo
10	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	27	Kecamatan Sentolo
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	Kecamatan Kokap
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29	Kecamatan Pengasih
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30	Kecamatan Lendah
14	Dinas PMDPP dan KB	31	Kecamatan Galur
15	RSUD Wates	32	Kecamatan Panjatan
16	RSUD Nyi Ageng Serang	33	Kecamatan Wates
17	Kelurahan Wates	34	Kecamatan temon

Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 yaitu (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisyah, Wanita Islam,

Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI.

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator untuk menghitung Capaian angkatan kerja perempuan. Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1. Angka Partisipasi Kerja Perempuan 2014 - 2019



Sumber data: Dinas Sosial PPPA diolah 2019

Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun 2018-2019. Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dilihat dari peningkatan peran perempuan di bidang ketenagakerjaan. Tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ada pembatasan usia dalam partisipasi angkatan kerja yaitu umur antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun, sementara pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tidak ada batasannya.

- 2) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan formulasi sebagai berikut:
((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif /Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 25) + (Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak/Jumlah seluruh kecamatan)x30) + ((Jumlah desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak/jumlah desa dan kelurahan)x30)+((1-(jumlah kasus KDRT/Jumlah keluarga)x15).

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.10
 Cakupan Perlindungan Perempuan dan
 Anak Tahun 2019

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	105	131
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	105	131
3	Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan layak anak	6	6
4	Jumlah seluruh kecamatan	12	12
5	Jumlah desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	40	40
6	Jumlah desa dan kelurahan	88	88
7	Jumlah kasus KDRT	50	29
7	Jumlah Keluarga	149.900	149.976
	Capaian indikator kinerja program	68.63	68.63

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Realisasi Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2019 dari target sebesar 68.63 % tercapai sebesar 68.63 %. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Target pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2019 adalah 105 kasus terealisasi 131 kasus. Jumlah kasus tersebut terdata dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring kerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Pelayanan kasus kekerasan tersebut didukung adanya komitmen P2TP2A untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta, didukung dan bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY.

Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.11

Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan
Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2019

No	Jejaring FPKK	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus Kasus Baru		
		Perempuan	Anak	Jumlah Korban
1	UPPA POLRES	16	13	29
2	RSUD Wates	3	5	8
3	Dinas Kesehatan	7	3	10
4	P2TP2A	21	42	63
5	Dinsospppa (Peksos)	4	13	17
6	RS.Risky Amalia Medika	1	0	1
7	RS PKU Muh Nanggulan	2	1	3
	Jumlah Kasus Baru	54	77	131

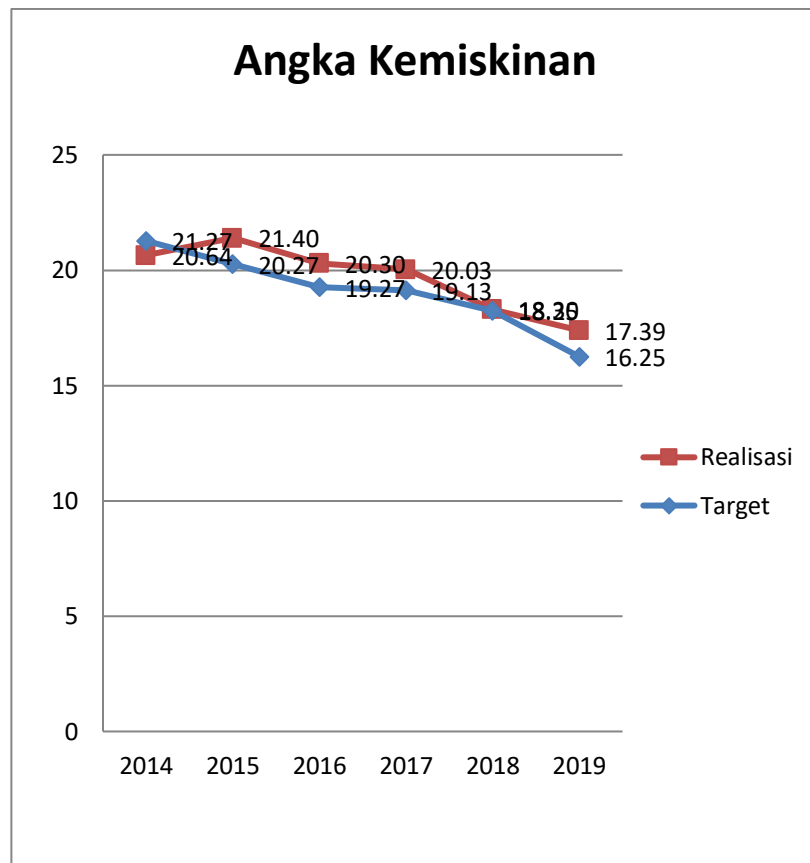
Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2019

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Angka Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo kurun waktu lima tahun dari tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 2 :

Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kabupaten Kulon Progo



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo cukup serius terhadap Upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Sesuai Perda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan langkah seirus pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai program terobosan seperti “Gentong rembes” seperti yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan bedah rumah dan jambanisasi telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena dari 17 indikator kemiskinan 5 diantaranya sudah teratasi, yakni :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m²;
2. Jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah;

3. Jenis dinding tempat tinggal terluas terbuat dari bamboo/kayu berkualitas rendah;
4. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik dan atau tagihan listrik rata-rata perbulan kurang dari Rp.17.500,00;
5. Tidak punya fasilitas MCK/milik bersama/umum.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga secara maksimal menggandeng pihak swasta melalui forum CSR dalam penanganan kemiskinan. Dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon Progo dengan adanya beberapa mega proyek yaitu Proses pembangunan bandara baru Internasional, pelabuhan Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional dan kini sudah berjalan. Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa datang.

Isu-isu strategis yang menjadi **tantangan** Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan Orang Tua terlantar ;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai ;
- 3) Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS;
- 4) Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara frekuensi/variasi bencana sangat kompleks;
- 5) Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya;

- 6) Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS;
- 7) Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah;
- 8) Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga;
- 9) Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan merupakan prioritas utama dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah. Masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulon Progo lebih banyak dijumpai di Bagian Utara yang merupakan daerah Perbukitan Menoreh. Gejala kemiskinan tersebut disebabkan antara lain oleh daya dukung alam yang relatif kurang, prasarana sosial ekonomi yang belum merata dan kelembagaan yang belum menjangkau masyarakat setempat serta mutu sumberdaya manusia yang relatif masih rendah.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah dalam bentuk :

- e. penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS;

- f. pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
 - g. penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi PMKS;
- Permasalahan kemiskinan tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan dalam Urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Kulon Progo. **Tantangan yang sekaligus menjadi peluang untuk dapat dikembangkan dalam bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :**

Permasalahan lain yang menjadi **tantangan** dalam urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Urusan Sosial :

Berbagai tantangan dan peluang yang mampu dioptimalkan sebagai upaya mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo, seperti :

- a. Jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
- b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
- c. Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.
- d. Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, seperti Panti Sosial. Secara kelembagaan sudah ada , namun sarana prasarana pendukung belum ada.
- e. Kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. Selain itu program-program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian.
- f. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagan tersebut dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

Urusan Pemberdayaan Perempuan :

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti :

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi on line oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- h. Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja PD tahun 2021. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.

Pada forum Perangkat daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku OPD baik dari kelompok maupun dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan Perangkat Daerah Kabupaten, Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Tantangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, dapat diidentifikasi ke dalam (7) tujuh isu strategis yaitu Kemiskinan, Kecacatan, Ketelantaran, Ketunaan susila, Keterasingan, korban Bencana, Korban tindak kekerasan dan Exploitasi dan Diskriminasi.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, Program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh (7) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial antara lain, Fakir miskin, Lanjut usia terlantar, Penyandang cacat, Anak terlantar, Komunitas anak terpencil, Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Tunawisma.

Pembangunan Urusan kesejahteraan sosial adalah :

- 1) Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- 2) Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
- 3) Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
- 4) Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
- 5) Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia potensial;
- 6) Terjaminnya Eks penderita penyakit kronis dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- 7) Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

- 8) Tersedianya jangkauan dan jaminan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua propinsi dan Kabupaten /Kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran pada Renja OPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021
		Meningkatnya Layanan Capaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangka darah	100 %
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, Menurunnya Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Capaian penanganan permasalahan sosial	71.68 %
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	66,28 %

3.3. Program dan Kegiatan

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah "**Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas**", dengan prioritas yang ditetapkan meliputi :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, industrialisasi, dan kesempatan Kerja

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

5. Stabilitas Pertahan dan Keamanan

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang telah dituangkan dalam RKP 2020 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai dan beriringan dengan ketersediaan anggaran. Adapun Secara rinci usulan Program dan kegiatan Tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.2 dan 3.3 sebagai berikut :

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2021 disusun berdasarkan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Sosial PPPA 2017-2022 serta RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Penyusunan Renja OPD ini dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, kecamatan dan pemangku pembangunan lainnya yang telah menghasilkan prioritas kegiatan dan sasaran merupakan acuan/pedoman dalam pelaksanaan Forum OPD yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam Forum Musrenbang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2021.

Agar realisasi Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 13 Agustus 2020

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo,

Kepala Dinas



Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 (tahun berjalan)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.06 Urusan Sosial																		
1.06.1.06.01.01.00.01	Non Kegiatan (Gaji dan Tunjangan)	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai 14 kali (bulan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	0	0	0	0	100	339,951,060	100	336,778,821	100	98,57	100	336,778,821	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
1.06.1.06.01.01.01.26	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap serta peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor, barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka (bulan)		0	0	0	0	215,428,060	12	212,421,660	0	98,60	12	212,421,660	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.06.1.06.01.01.01.27	Penyediaan Jasa Keuangan	Penatausahaan keuangan dan barang (bulan)		0	0	0	0	30,499,000	12	30,414,000	0	99.72	12	30,414,000	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.01.28	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi (bulan)		0	0	0	0	94,024,000	12	93,943,161	0	99.91	12	93,943,161	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)	0	0	0	0	100	433,915,200	100	409,562,414	100	94.84	100	409,562,414	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.11.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah kendaraan operasional dinas roda 2, peralatan dan perlengkapan kantor (komputer/laptop, AC, meubeler, printer, dll) (unit)		0	0	0	0	163,633,000	27	155,645,770	0	95.12	27	155,645,770	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.06.1.06.01.01.11.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan gedung kantor, peralatan pelatihan, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dan 6 (unit)		0	0	0	270,282,200	12	253,916,644	0	93.95	12	253,916,644	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
1.06.1.06.01.01.13.03	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat (orang)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
1.06.1.06.01.01.12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)	0	0	0	100	52,799,450	100	51,378,500	100	72,63	100	51,378,500	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
1.06.1.06.01.01.12.01	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017 serta Renstra Tahun 2017-2021 (dokumen)		0	0	0	25,797,200	3	24,995,000	0	96.89	3	24,995,000	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
1.06.1.06.01.01.12.02	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun (dokumen)		0	0	0	6,912,250	14	6,795,000	0	98.30	14	6,795,000	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.06.1.06.01.01.12.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan, LKjIP, data LKPJ/LPPD (dokumen)		0	0	0	0	20,090,000	16	19,588,500	0	97.5	16	19,588,500	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.25	Program Perlindungan Sosial	Indeks Perlindungan Sosial (%)	0	0	0	0	79.66	1,441,787,556		1,353,670,484		99,70		1,353,670,484	0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.24.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan PMKS	TerFasilitasinya Pendampingan KPKD (88 orang)		0	0	0	88	1,330,779,906	88	1,242,771,584	88	93.39	88	1,242,771,584	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Tersosialisasinya mekanisme pemberian bantuan		0	0	0	5		5		5		5		0			
		Pelayanan pada PMKS		0	0	0	12		12		12		12		0			
		Bantuan bagi PMKS		0	0	0	8		8		8		8		0			
1.06.1.06.01.01.24.02	Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	Jumlah korban yang bencana yang dibantu (KK)		0	0	0	400	85,984,300	400	85,900,800	0	99,90	400	85,900,800	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Jumlah KSB yang dibina (desa)		0	4	4		4		4		4		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Operasional Posko Siaga Bencana (bulan)		0	12	12		12		12		12		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Jumlah TAGANA yang aktif (orang)		0	155	155		155		155		155		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat yang tersedia (paket)		0	1	1		1		1		1		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Jumlah jejaring kemitraan yang dilaksanakan (kemitraan)		0	5	5		5		5		5		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Apel, Siaga Tagana (kali)		0	1	1		1		1		1		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.06.1.06.01.01.24.09	Penjangkauan dan Pelayanan Sosial	Jumlah PGOT yang dilayani (orang)		0	0	0	60	25,023,350	60	24,998,100	60	99,90	60	24,998,100	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.24	Program Pemberdayaan Sosial	Indeks Pemberdayaan Sosial (%)	0	0	0	0	79.66	1,008,171,000		981,556,463		96,87		981,556,463	0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.24.03	Peningkatan Pelayanan Distribusi Rastra	Jumlah Koordinasi dan Monev Rastra (alokasi)		0	0	0	12	188,034,375	12	182,123,300	12	96.86	12	182,123,300	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Laporan Distribusi Bantuan Pangan					12		12		12		12					
1.06.1.06.01.01.24.04	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Database KUBE		0	0	0	1	93,075,000	1	86,906,563	1	93.37	1	86,906,563	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Pelatihan KUBE			0		4		4		4		4		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Monitoring dan evaluasi KUBE dan UEP					30		30		30		30					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Bantuan sosial kepada PMKS					50		50			50		50					
1.06.1.06.01.01.24.05	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelayanan Sosial Bagi PMKS	Hari Lanjut Usia (HALUN) dan Hari Disabilitas Nasional (HDI)		0	0	0	600	135,944,650	600	129,853,900	600	95.52	600	129,853,900	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
		Jumlah kerjasama pelayanan PMKS(Panti dan LKSA)					23		23			23		23					
		Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN)					1		1			1		1					
		Pelayanan Jamkesus terpadu					1		1			1		1					
		Pengiriman kontingen hari disabilitas internasional					1		1			1		1					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Koordinasi Kabupaten inklusi					24		24			24		24					
1.06.1.06.01.01.24.07	Peningkatan Pelayanan PKH	Sosialisasi PKH		0	6	0	1	79,785,725	1	79,427,100	1	99.55	1	79,427,100	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
		Buku data penerima lanjut usia dan penyandang disabilitas			0		2		2			2		2	0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
		Pelayanan Sosial kepada PKH			0		12		12			12		12	0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
		Jumlah koordinasi PKH (kali)			0		12		12			12		12	0				
1.06.1.06.01.01.24.08	Peningkatan Kapasitas PSKS	Lomba kreativitas bagi PMKS		0	0	0	1	98,093,150	1	91,094,100	1	92.86	1	91,094,100	1	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Pembinaan LKS,WKSBM, Orsos ,TKSK,PSM,KUBE, KARANG TARUNA			0	7		7		7		7		7		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
		koordinasi PSKS				30		30		30		30		30				
		Pemberian hadiah bagi PSKS yang berprestasi				5		5		5		5		5				
		Fasilitasi peserta HKS				100		100		100		100		100				
1.06.1.06.01.01.24.10	Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Data Kemiskinan (dokumen)		0	0	0	1	413,238,100	1	412,151,500	1	99.74	1	412,151,500	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.02.1.06.01.01.21	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (%)	0	0	0	0	89,2	137,925,900	82,34	132,647,100	100	65,72	82,34	132,647,100	0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.02.1.06.01.01.21.01	Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender	Peringatan hari IBU		0	0	0	1	37,526,800	1	37,303,400	1	99.4	1	37,303,400	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Koordinasi GOW					12		12		12		12					
2.02.1.06.01.01.21.02	Peningkatan Peran Wanita	Pembinaan kelompok P2WKSS dan Desa Prima serta pemberdayaan ekonomi perempuan (kali)		0	0	0	12	30,171,800	12	29,485,600	12	97.73	12	29,485,600	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Terbinanya desa prima (desa)					10		10		10		10					
2.02.1.06.01.01.21.03	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Ekspos hasil karya kaum perempuan		0	0	0	1	27,091,000	1	26,513,400	1	97.87	1	26,513,400	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.02.1.06.01.01.21.08	Penguatan Pengarusutamaan Gender	Laporan evaluasi PUG,PP dan PA (laporan)		0	0	0	1	17,995,300	1	14,922,600	1	82.92	1	14,922,600	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Pelatihan PPRG dan ARG (kali)			0		1		1		1		1		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2.02.1.06.01.01.21.09	2.02.1.06.01.01.21.09	2.02.1.06.01.01.21.09		0	0	0	1	25,141,000	1	24,422,100	1	97.14	1	24,422,100	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.02.1.06.01.01.21	2.02.1.06.01.01.21	2.02.1.06.01.01.21	0	0	0	77,76	508,000,000	72,77	501,616,885	93,58	43,51	72,77	501,616,885	0			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.02.1.06.01.01.21.04	2.02.1.06.01.01.21.04	2.02.1.06.01.01.21.04		0	0	0	5	29,730,675	5	29,404,400	5	98.9	5	29,404,400	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
					0		9		9		9		9		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
					0		13		13		13		13		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.02.1.06.01.01.21.05	2.02.1.06.01.01.21.05	2.02.1.06.01.01.21.05		0	0	0	370	196,158,800	370	195,978,700	370	99.91	370	195,978,700	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019(sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.02.1.06.01.01.21.06	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan		0	0	0	105	77,283,756	105	76,859,406	105	99.45	105	76,859,406	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Gugus Tugas TPPO					13		13		13		13					
		Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak					36		36		36		36					
2.02.1.06.01.01.21.07	Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan (ke)		0	0	0	12	61,851,500	12	60,916,500	23,08	98.49	12	60,916,500	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Koordinasi FPKK tingkat kabupaten dan kecamatan (forum)					13		13		13		13		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan(perbup)					1		1		1		1					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			3	4		7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Pelatihan kader perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat			0	220		220		220		220		0		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1 Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	63,06%	45.00%	45.00%	45.00%	50.00%	63,50%	45.00%	45.00%	65.00%	
II	SPM Urusan Pemberdayaan Perempuan											
	1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengasuhan oleh petugas terlatih di dalam UPT	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT	75%		75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	
	4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT	75%		75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	
	5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%		80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	
	6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%		50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	50%	
	7 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%		50%	50%	50%	50%	0	50%	50%	50%	
	8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80%		80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2021 Kabupaten Kulon Progo
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN SOSIAL				5,924,629,350					5,991,561,700	
I.	Program Perlindungan Sosial		Indek Perlindungan Sosial %	94.09	5,924,629,350	Program Perlindungan Sosial		Indek Perlindungan Sosial	94.09	5,991,561,700	
1	Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	Lingkup Kabupaten	Fasilitasi penyaluran bantuan pangan non tunai RT	10000 RT	1,178,391,100	Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	Lingkup Kabupaten			1,215,323,450	
			Pelayanan sosial pada PMKS	4362 orang							
			Terfasilitasinya pendamping SLRT	0 orang							
			Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	88 orang							
			Tersosialisasikannya mekanisme pemberian bantuan	2 kali							
2	Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Lingkup Kabupaten	Terselenggarannya apel siaga tagana	155 orang	142,234,300	Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Lingkup Kabupaten	Terselenggarannya apel siaga tagana	155 orang	157,234,300	
			Terlaksananya bimbingan teknis Tagana dan KSB	300 orang				Terlaksananya bimbingan teknis Tagana dan KSB	300 orang		
			Operasional Posko Siaga Tagana	12 bln				Operasional Posko Siaga Tagana	12 bln		
			Jumlah Tagana yang Aktif	0 orang				Jumlah Tagana yang Aktif	0 orang		
			Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat yang tersedia	0 paket				Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat yang tersedia	0 paket		
			Jumlah jejaring kemitraan yang dilaksanakan	0 kemitraan				Jumlah jejaring kemitraan yang dilaksanakan	0 kemitraan		
			Jumlah korban bencana yang dibantu	250 KK				Jumlah korban bencana yang dibantu	250 KK		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Seragam PDH bagi TAGANA	155 orang				Seragam PDH bagi TAGANA	155 orang		
			Terlaksannya sosialisasi KSB	100 orang				Terlaksannya sosialisasi KSB	100 orang		
			Jumlah KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang dibina	4 KSB				Jumlah KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang dibina	4 KSB		
			Jumlah KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang dibina	0 desa				Jumlah KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang dibina	0 desa		
			Terselenggara apel siaga tagana	0 kali				Terselenggara apel siaga tagana	0 kali		
3	Penjangkauan dan Pelayanan Sosial	Lingkup Kabupaten	Fasilitasi orang terlantar persen	100 persen	4,604,003,950	Penjangkauan dan Pelayanan Sosial	Lingkup Kabupaten	Fasilitasi orang terlantar persen	100 persen	4,619,003,950	
			Penjangkauan PGOT(pengemis,gelandangan,orang terlantar)	12 kali				Penjangkauan PGOT(pengemis,gelandangan,orang terlantar)	12 kali		
			Jumlah PMKS yang dilayani	80 orang				Jumlah PMKS yang dilayani	80 orang		
			PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	0 orang				PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	0 orang		
			Tersediannya dan tersalurkannya bantuan bagi PMKS	7 jenis				Tersediannya dan tersalurkannya bantuan bagi PMKS	7 jenis		
			PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	0 bulan				PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	0 bulan		
			Tersediannya dan tersalurkannya bantuan bagi PMKS	0 orang/panti				Tersediannya dan tersalurkannya bantuan bagi PMKS	0 orang/panti		
II.	Program Pemberdayaan Sosial		Indek Pemberdayaan Sosial	41.87	#REF!	Program Pemberdayaan Sosial		Indek Pemberdayaan Sosial	41.87	#REF!	
1	Peningkatan pelayanan distribusi rastra	Lingkup Kabupaten	Terlaksannya koordinasi dan Monev bantuan pangan kali	0 kali	-	Peningkatan pelayanan distribusi rastra	Lingkup Kabupaten	Terlaksannya koordinasi dan Monev bantuan pangan kali	0 kali	-	
			Laporan distribusi bantuan pangan	0 dok				Laporan distribusi bantuan pangan	0 dok		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bintek Penyaluran Bantuan Pangan	0 orang				Bintek Penyaluran Bantuan Pangan	0 orang		
			Sosialisasi bantuan Pangan	0 orang				Sosialisasi bantuan Pangan	0 orang		
2	Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Lingkup Kabupaten	Terlaksananya monitoring dan evaluasi KUBE dan UEP kali	24 kali	38,899,900	Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Lingkup Kabupaten	Terlaksananya monitoring dan evaluasi KUBE dan UEP kali	24 kali	43,893,900	
			Pelatihan KUBE	0 kali				Pelatihan KUBE	0 kali		
			Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sosial kepada PMKS	0 kel				Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sosial kepada PMKS	0 kel		
			Jumlah PMKS yang diberdayakan	0 kel				Jumlah PMKS yang diberdayakan	0 kel		
			Tersusunnya database KUBE	1 dok				Tersusunnya database KUBE	1 dok		
3	Peningkatan Jejaring kerjasama pelayanan sosial bagi PMKS	Lingkup Kabupaten	database PMKS	1 data	133,330,000	Peningkatan Jejaring kerjasama pelayanan sosial bagi PMKS	Lingkup Kabupaten	database PMKS	1 data	137,513,000	
			Pelayanan Jamkesmas Terpadu	0 kali				Pelayanan Jamkesmas Terpadu	0 kali		
			Kerjasama pelayanan PMKS dengan panti/LKS	20 lembaga				Kerjasama pelayanan PMKS dengan panti/LKS	20 lembaga		
			Koordinasi Kabupaten inklusi	0 kali				Koordinasi Kabupaten inklusi	0 kali		
			Pelayanan Jamkesmas Terpadu	200 orang				Pelayanan Jamkesmas Terpadu	200 orang		
			Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN)	0 kali				Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN)	0 kali		
			Jumlah Kerjasama pelayanan PMKS	25 lembaga				Jumlah Kerjasama pelayanan PMKS	25 lembaga		
			Terselenggarannya hari Lanjut Usia (HALUN) dan Hari Disabilitas Indonesia (HDI)	0 orang				Terselenggarannya hari Lanjut Usia (HALUN) dan Hari Disabilitas Indonesia (HDI)	0 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sarasehan komda lansis	55 kali				Sarasehan komda lansis	55 kali		
			Fasilitasi rukujan PMKS	0 kali				Fasilitasi rukujan PMKS	0 kali		
			Sosialisasi jamkesus terpadu 2 kali (jamkesus terpadu APBD kp 93 orang. Jamkesus terpadu non apbd KP 66 ORANG	159 orang				Sosialisasi jamkesus terpadu 2 kali (jamkesus terpadu APBD kp 93 orang. Jamkesus terpadu non apbd KP 66 ORANG	159 orang		
			Fasilitasi pengiriman peserta hari lanjut usia nasional (HALUN) DIY	1 kali				Fasilitasi pengiriman peserta hari lanjut usia nasional (HALUN) DIY	1 kali		
			Fasilitasi pengiriman peserta hari disabilitas internasional (HDI)	1 kali				Fasilitasi pengiriman peserta hari disabilitas internasional (HDI)	1 kali		
			Terlaksannya Adopsi Anak	12 bulan				Terlaksannya Adopsi Anak	12 bulan		
			Pelayanan Jamkesus Disabilitas Terpadu	1 kali				Pelayanan Jamkesus Disabilitas Terpadu	1 kali		
			Pengiriman kontingen hari disabilitas nasional	0 kali				Pengiriman kontingen hari disabilitas nasional	0 kali		
4	Peningkatan Pelayanan PKH	Lingkup Kabupaten	Terlaksannya Sosialisasi PKH	2 kali	134,249,900	Peningkatan Pelayanan PKH	Lingkup Kabupaten	Terlaksannya Sosialisasi PKH	2 kali	142,000,900	
			Pelayanan sosial kepada PKH bulan	0 bulan				Pelayanan sosial kepada PKH bulan	0 bulan		
			Upaya Pemberdayaan Keluarga, FDS (Family Development Session)	4 kali				Upaya Pemberdayaan Keluarga, FDS (Family Development Session)	4 kali		
			Buku data penerima bantuan lanjut usia dan penyandang disabilitas	2 dok				Buku data oenerima bantuan lanjut usia dan penyandang disabilitas	2 dok		
			Koordinasi PKH	14 kali				Koordinasi PKH	14 kali		
			Bintek Graduasi PKH	203 orang				Bintek Graduasi PKH	203 orang		
			Sosialisasi Assesment PKH Graduasi	203 orang				Sosialisasi Assesment PKH Graduasi	203 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan sosial kepada PKH	0 KK				Pelayanan sosial kepada PKH	0 KK		
5	Peningkatan Kapasitas PSKS	Lingkup Kabupaten	Terlaksananya lomba kreativitas bagi PMKS kali	1 kali	75,005,000	Peningkatan Kapasitas PSKS	Lingkup Kabupaten	Terlaksananya lomba kreativitas bagi PMKS kali	1 kali	82,005,000	
			Terbinanya LKS, WKSBM, Orsos, TKS, PSM, KUBE, dan Karang Taruna	0 lmb/org				Terbinanya LKS, WKSBM, Orsos, TKS, PSM, KUBE, dan Karang Taruna	0 lmb/org		
			Terfasilitasinya koordinasi PSKS	30 kali				Terfasilitasinya koordinasi PSKS	30 kali		
			Terselenggaranya pemberian hadiah bagi PSKS yang berprestasi	0 lembaga				Terselenggaranya pemberian hadiah bagi PSKS yang berprestasi	0 lembaga		
			Terfasilitasinya peserta HKS	100 org				Terfasilitasinya peserta HKS	100 org		
			Terbinanya LKS, WKSBM, Orsos, TKS, PSM, KUBE, dan Karang Taruna	15 kali				Terbinanya LKS, WKSBM, Orsos, TKS, PSM, KUBE, dan Karang Taruna	15 kali		
6	Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya dokumen data kemiskinan, PMKS (JKNPBI, KKS, PKH) dan pelayanannya berbasis pedukuhan dok	0 dok	281,119,000	Peningkatan Kapasitas PSKS	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya dokumen data kemiskinan, PMKS (JKNPBI, KKS, PKH) dan pelayanannya berbasis pedukuhan dok	0 dok	288,119,000	
			Bintek petugas verifikasi dan validasi data	0 orang				Bintek petugas verifikasi dan validasi data	0 orang		
			Verifikasi dan validasi basis data perpadu (BDT)	0 RT				Verifikasi dan validasi basis data perpadu (BDT)	0 RT		
7	Peningkatan Pelayanan Bantuan Sosial Pangan	Lingkup Kabupaten	Terlaksannaya koordinasi dan monev bantuan pangan kali	12 kali	97,647,530	Peningkatan Pelayanan Bantuan Sosial Pangan	Lingkup Kabupaten	Terlaksannaya koordinasi dan monev bantuan pangan kali	12 kali	100,100,260	
			Laporan distribusi bantuan pangan	12 dok				Laporan distribusi bantuan pangan	12 dok		
			Sosialisasi bantuan pangan	225 orang				Sosialisasi bantuan pangan	225 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bintek penyaluran bantuan pangan	210 orang				Bintek penyaluran bantuan pangan	210 orang		
8	Pengelolaan data Terpadu kesejahteraan Sosial	Lingkup Kabupaten	Dokumen data kemiskinan dok	1 dok		Pengelolaan data Terpadu kesejahteraan Sosial	Lingkup Kabupaten	Dokumen data kemiskinan dok	1 dok		
			Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu	20500 RT				Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu	20500 RT		
			Bintek Petugas verifikasi dan validasi data	102 orang				Bintek Petugas verifikasi dan validasi data	102 orang		
			Koordinasi petugas verval data	8 kali				Koordinasi petugas verval data	8 kali		
	Eks BAU					Eks BAU					
III	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Capaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	469,268,040	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Capaian pelayanan administrasi perkantoran	20%	469,268,040	
1	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Lingkup Kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat ,jasa pegawai tidak tetap serta peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka	12 bl	344,746,840	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Lingkup Kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat ,jasa pegawai tidak tetap serta peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka	12 bl	344,746,840	
			pengelola data 1org,pengelola administrasi keuangan 1 orang,pelaksana pengelola data 1 orang,sopir 1 orang,pramu kantor 1 orang,penjaga makam 1 orangpenjaga malam 1 orang dan petugas kebersihan 1 orang					pengelola data 1org,pengelola administrasi keuangan 1 orang,pelaksana pengelola data 1 orang,sopir 1 orang,pramu kantor 1 orang,penjaga makam 1 orangpenjaga malam 1 orang dan petugas kebersihan 1 orang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	Penyediaan Jasa Keuangan	Lingkup Kabupaten	Terbayarnya honor penatausahaan keuangan dan barang bulan	12 bulan	30,499,000	Penyediaan Jasa Keuangan	Lingkup Kabupaten	Terbayarnya honor penatausahaan keuangan dan barang bulan	12 bl	30,499,000	
	3	Penyediaan Rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi	Lingkup Kabupaten	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ,makanan dan minuman ,koordinasi dan konsultasi bulan	12 bl	94,022,200	Penyediaan Rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi	Lingkup Kabupaten	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ,makanan dan minuman ,koordinasi dan konsultasi bulan	12 bl	94,022,200	
IV		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja		capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	100%	52,798,900	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja		capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	100%	52,798,900	
	1	Penyusunan Perencanaan kinerja SKPD	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya Rev.Renstra, Renja SKPD dan Renja Perubahan dok	2 dok	25,797,100	Penyusunan Perencanaan kinerja SKPD	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya Rev.Renstra, Renja SKPD dan Renja Perubahan dok	2 dok	25,797,100	
	2	Penyusunan Laporan Keuangan	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya laporan Bulanan, Semesteran dan akhir Tahun dok	14 dok	6,911,800	Penyusunan Laporan Keuangan	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya laporan Bulanan, Semesteran dan akhir Tahun dok	14 dok	6,911,800	
		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya laporan triwulanan, lap tahunan, monitoring evaluasi kinerja dinas ,LKPJ, LPPD LKJlp dok	21 dok	20,090,000	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya laporan triwulanan, lap tahunan, monitoring evaluasi kinerja dinas ,LKPJ, LPPD LKJlp dok	21 dok	20,090,000	
V		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD		Capaian Peningkatan Saran Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	20%	199,934,900	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD		Capaian Peningkatan Saran Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	20%	199,934,900	
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Lingkup Kabupaten	Jumlah operasional dinas roda 4(1 unit)peralatan dan perlengkapan kantor komputer (2 unit)Camera (1unit) LCD (1unit)meja kerja biro (4 unit) kursi kerja (1 unit) kursi tunggu (2 unit) rak arsip (1 unit)	27 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Lingkup Kabupaten	Jumlah operasional dinas roda 4(1 unit)peralatan dan perlengkapan kantor komputer (2 unit)Camera (1unit) LCD (1unit)meja kerja biro (4 unit) kursi kerja (1 unit) kursi tunggu (2 unit) rak arsip (1 unit)	27 unit	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Lingkup Kabupaten	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor peralatan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dll unit	12 bulan	199,934,900	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Lingkup Kabupaten	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor peralatan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dll unit	12 bulan	199,934,900	
								Pembayaran listrik	12 bulan			
VI	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender		Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender%	66.61	144,822,195	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender		Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender%	66.61	151,718,490		
	1	Pemberdayaan lembaga berbasis Gender	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender	1 Dok	33,768,995	Pemberdayaan lembaga berbasis Gender	Lingkup Kabupaten	Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender	1 Dok	37,565,290	
			Terkoordinasinya lembaga berbasis gender kali	0 kali				Terkoordinasinya lembaga berbasis gender kali	0 kali			
			Terfasilitasinya koordinasi GOW	12 kali				Terfasilitasinya koordinasi GOW	12 kali			
			Terfasilitasinya peringatan hari ibu	60 orang				Terfasilitasinya peringatan hari ibu	60 orang			
			Terlaksananya sosialisasi berpolitik untuk perempuan	60 orang				Terlaksananya sosialisasi berpolitik untuk perempuan	60 orang			
	2	Peningkatan Peran Wanita	Lingkup Kabupaten	Terbinannya kelompok P2WKSS dan desa prima serta pemberdayaan ekonomi perempuan kali	46 orang	34,171,800	Peningkatan Peran Wanita	Lingkup Kabupaten	Terbinannya kelompok P2WKSS dan desa prima serta pemberdayaan ekonomi perempuan kali	46 orang	36,271,800	
			Terbinannya kelompok P2WKSS dan desa prima serta pemberdayaan ekonomi perempuan kali	0 kali				Terbinannya kelompok P2WKSS dan desa prima serta pemberdayaan ekonomi perempuan kali	0 kali			
			Terbinannya kewirausahaan bagi perempuan miskin	50 orang				Terbinannya kewirausahaan bagi perempuan miskin	50 orang			
			Terbinanya kewirausahaan bagi perempuan miskin	0 desa				Terbinanya kewirausahaan bagi perempuan miskin	0 desa			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Lingkup Kabupaten	Ekspos hasil karya kaum perempuan	1 kali	29,091,000	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Lingkup Kabupaten	Ekspos hasil karya kaum perempuan	1 kali	30,091,000	
			Laporan evaluasi GSI dokumen	0 dok				Laporan evaluasi GSI dokumen	0 dok		
			Koordinasi Pokjatap GSI kabupaten dan satgas GSI kecamatan	0 kali				Koordinasi Pokjatap GSI kabupaten dan satgas GSI kecamatan	0 kali		
			Evaluasi gerakan sayang ibu (GSI) tingkat kabupaten	0 kali				Laporan evaluasi GSI	0 kali		
4	Penguatan Pengarusutamaan Gender	Lingkup Kabupaten	Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan dokumen	1 dok	47,790,400	Penguatan Pengarusutamaan Gender	Lingkup Kabupaten	Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan dokumen	1 dok	47,790,400	
			Terbentuknya desa sadar gender	7 desa				Terbentuknya desa sadar gender	7 desa		
			Terselenggaranya konsultasi PPRG dan ARG	0 kali				Terselenggaranya konsultasi PPRG dan ARG	0 kali		
			Tersusunnya profil pengarusutamaan gender	1 dokumen				Tersusunnya profil pengarusutamaan gender	1 dokumen		
			Tersusunnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA	1 dokumen				Tersusunnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA	1 dokumen		
			Terlaksannya pelatihan PPRG dan ARG	0 orang				Terlaksannya pelatihan PPRG dan ARG	0 orang		
			Tersusunnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA	0 laporan				Tersusunnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA	0 laporan		
			Terlaksannya pelatihan PPRG dan ARG	0 kali				Terlaksannya pelatihan PPRG dan ARG	0 kali		
5	Pemutahiran Data Pilah Gender dan Anak	Lingkup Kabupaten	Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan dokumen	0 dok	-	Pemutahiran Data Pilah Gender dan Anak	Lingkup Kabupaten	Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan dokumen	0 dok	-	
VII	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak %	88,86%	400,785,735	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak %	88.86%	419,870,770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan Kabupaten Layak Anak	Lingkup Kabupaten	Terlaksannya pelatihan konvensi hak anak orang	110 orang	244,874,335	Pembinaan Kabupaten Layak Anak	Lingkup Kabupaten	Terlaksannya pelatihan konvensi hak anak orang	110 orang	244,874,335	
			Terevaluasinya kabupaten layak anak	1 dokumen				Terevaluasinya kabupaten layak anak	1 dokumen		
			Terkoordinasinya forum anak kulon progo dan forum anak kec	0 kali				Terkoordinasinya forum anak kulon progo dan forum anak kec	0 kali		
			Terkoordinasinya gusus tugas kabupaten layak anak	0 kali				Terkoordinasinya gusus tugas kabupaten layak anak	0 kali		
			Terlaksannya pembinaan kabupaten layak anak	12 kali				Terlaksannya pembinaan kabupaten layak anak	12 kali		
			Terfasilitasinya peringatan hari anak	1 kali				Terfasilitasinya peringatan hari anak	1 kali		
			Tersusunnya kebijakan tentang pengembangan KLA	1 perbup				Tersusunnya kebijakan tentang pengembangan KLA	1 perbup		
2	Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah keluarga miskin	Lingkup Kabupaten	Penyediaan makanan tambahan bagi anak keluarga miskin	0 anak	-	Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah keluarga miskin	Lingkup Kabupaten	Penyediaan makanan tambahan bagi anak keluarga miskin	0 anak	-	
3	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Lingkup Kabupaten	Terlaksannya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan orang	0 orang	97,909,900	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Lingkup Kabupaten	Terlaksannya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan orang	0 orang	102,909,900	
			Operasional P2TP2A	12 bulan				Operasional P2TP2A	12 bulan		
			Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	40 orang				Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	40 orang		
			Rapat koordinasi pendampingan perempuan dan korban kekerasan	25 kali				Rapat koordinasi pendampingan perempuan dan korban kekerasan	25 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terlaksannya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan orang	12 bulan				Terlaksannya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan orang	12 bulan		
4	Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Lingkup Kabupaten	Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kecamatan	0 kecamatan	58,001,500	Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Lingkup Kabupaten	Terkoordinasikannya FPKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan	13 forum	72,086,535	
			Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	0 perbup				Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	12 kec		
			Terkoordinasinya FPKK tingkat kabupaten dan kecamatan	15 forum				Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	1 Perbup		
			Terlatihnya kader perlindungan Perempuan dan Anak berbasis Masyarakat	0 orang				Terlatihnya kader perlindungan Perempuan dan Anak berbasis Masyarakat	220 org		
			Tersosialisasinya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	0 orang				Tersosialisasinya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	0 orang		
5	Pencegahan dan penanganan kekerasan Terhadap perempuan dan Anak	Lingkup Kabupaten	Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kecamatan	36 orang	-	Pencegahan dan penanganan kekerasan Terhadap perempuan dan Anak	Lingkup Kabupaten	Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kecamatan	36 orang	-	
			Terlaksannya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan orang	12 bulan				Terlaksannya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan orang	12 bulan%		

Tabel 3.3 :
Usulan Belanja Bantuan Hibah Bansos
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

No	Uraian	OPD	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	Keterangan
1	Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa	Dinas Sosial PPPA	325,000,000	
	- Korban meninggal sejumlah 10 orang @Rp.5.000.000,-			
	- Korban cacat berat sejumlah 14 orang @Rp.15.000.000,-			
	- Korban cacat ringan sejumlah 13 orang @Rp.5.000.000,-			
2	Bantuan Pangan Non Tunai (5000 KK @ Rp.200.000/bulan)	Dinas Sosial PPPA	12,000,000,000	
4	Pemberian bantuan sosial anak balita terlantar sejumlah 100 anak @ Rp.1.000.000	Dinas Sosial PPPA	100,000,000	
6	Pemberian bantuan sosial bagi panti asuhan dan panti jompo sejumlah 23 panti	Dinas Sosial PPPA	360,000,000	
7	Pemberian bantuan sosial pelayanan psikotik sejumlah 20 orang @ Rp. 250.000,-	Dinas Sosial PPPA	5,000,000	
9	Perawatan jenazah	Dinas Sosial PPPA	10,000,000	
10	Hibah PMI	Dinas Sosial PPPA	50,000,000	
	Jumlah		12,850,000,000	

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KULON PROGO**

NO	DOKUMEN/JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN					
		MATERI		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	TINDAKLANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK SESUAI
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SK Tim Penyusun Renja SKPD	√		√			
2	Rencana Kerja Tim	√		√			
3	Data dan Informasi	√		√			
4	Analisis gambaran pelayanan SKPD Provinsi	√		√			
5	Mengkaji hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD	√		√			
6	Penentuan Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	√		√			
7	Penelaahan Rancangan awal RKPД	√		√			
8	Perumusan tujuan dan sasaran	√		√			
9	Penelaahan usulan masyarakat	√		√			
10	Perumusan kegiatan prioritas	√		√			
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD propinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten	√		√			
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD propinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan	√		√			
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD	√		√			
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√		√			
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai SE Kepala Daerah	√		√			
12	Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√		√			

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD	v		v			
14	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	v		v			

Wates, 06 Juli 2020
Mengetahui
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kulon Progo

Triyono, SIP.M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661115 199603 1002

Wates, 06 Juli 2020
Disusun
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo

Drs. Yohanes Irianta, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

Tabel 3.2 :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

SKPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.000)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	OPD
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN SOSIAL													-
i.	1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%					467,217,000	469,268,040		
	1.06.1.06.01.01.01.26	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel			Terpenuhinya Kebutuhan jasa surat menyurat,jasa pegawai tidak tetap serta peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka	12 bulan	Dukungan 69,97% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	326,930,000	344,746,840	Sedang Berjalan	Dinas Sosial Dan PPPA
							Pengelola data 1 orang,pengelola administrasi keuangan 1 orang,peleaksana pengelola data 1 orang, sopir 1 orang, pramu kantor 1 orang, penjaga makam 1 orang, penjaga malam 1 orang,dan petugas kebersihan 1 orang	12 bulan						

	1.06.1.06.01.01.01.2 7	Penyediaan jasa keuangan	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup Kabupaten			Terbayarnya Honor penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	Dukungan 12,91% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,325,000	30,499,000	Sedang Berjalan	Dinas Sosial Dan PPPA
	1.06.1.06.01.01.01.2 8	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup Kabupaten			Tersediannya dana untuk perjalanan dinas, makanan dan minuman, koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Dukungan 17,11% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	79,962,000	94,022,200	Sedang Berjalan	Dinas Sosial Dan PPPA
II.	1.06.1.06.01.01.12	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja				Capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	100%					26,225,400	52,798,900		
	1.06.1.06.01.01.12.0 1	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup Kabupaten			Rerusunnya Renja perangkat daerah Dinsos pppa dan Renja Perubahan dinsos pppa	2 dok	Dukungan 34,34% terhadap capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	100 %	9,005,000	25,797,100	Sedang Berjalan	Dinas Sosial Dan PPPA
	1.06.1.06.01.01.12.0 2	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup Kabupaten			Tersusunya laporan Bulanan, Semesteran dan akhir Tahun	1 4 dok	Dukungan 23,72% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	100 %	6,220,400	6,911,800	Sedang Berjalan	Dinas Sosial Dan PPPA

	1.06.1.06.01.01.12.03	Pengendalian. evaluasi dan pelaporan kinerja	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup Kabupaten		Tersusunnya laporan triwulanan, lap tahunan, monitoring evaluasi kinerja dinas ,LKPJ,LPPD LKjlp	21 dok	Dukungan 41,94% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	100 %	11,000,000	20,090,000	Sedang Berjalan	Dinas Sosial Dan PPPA
III.	1.06.1.06.01.01.14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD				Capaian Peningkatan sarana/Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	100%				185,941,410	199,934,900		
	1.06.1.06.01.01.14.01	Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup Kabupaten			13	Dukungan 100% terhadap peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	0	0		Dinas Sosial Dan PPPA
	1.06.1.06.01.01.14.02	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup Kabupaten		pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran berupa kendaraan dinas roda empat 5 unit,roda enam 1 unit,roda dua 8 unit,AC 2 unit,komputer/laptop 5 unit,printer 6 unit	12 bln	Dukungan 100% terhadap peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	185,941,410	199,934,900		Dinas Sosial Dan PPPA
							Pembayaran listrik,telepon,air dan komponen listrik dan kebersihan	12 bln						

IV.	1.06.1.06.01.01.24	Program Pemberdayaan Sosial				Indeks Pemberdayaan Sosial	41.87%					648,477,500	461,619,160		Dinas Sosial Dan PPPA
	1.06.1.06.01.01.24.04	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KUBE dan UEP	2 dok	Dukungan 3,67% terhadap capaian indeks pemberdayaan sosial	100 %	23,818,800	-		Dinas Sosial Dan PPPA
								Data Base KUBE	1 dok						
						Kab.Kulon Progo		Sosialisasi bansos KUBE	50 kelompok						
	1.06.1.06.01.01.24.05	Peningkatan Jejaring Kerjasama pelayanan Sosial Bagi PMKS	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat				Kerjasama pelayanan PMKS	25 lemb	Dukungan 22,74% terhadap capaian indeks pemberdayaan sosial	100 %	147,479,100	137,513,000		Dinas Sosial Dan PPPA
								Respon kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	12 bln						
								Fasilitasi pengiriman peserta Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN)DIY	1 kali						
								Fasilitasi pengiriman peserta Hari Disabilitas Internasional (HDI)	1 kali						
						Kab.Kulon Progo		Sosialisasi jamkesus terpadu	70 orang						
								Terlaksananya fasilitasi adopsi anak	12 bln						
								Pelayanan JAMKESUS Disabilitas Terpadu	1 kali						
						Kab.Kulon Progo		Hibah PMI	1 tahun						
						Kab.Kulon Progo		Bantuan sosial perawatan jenazah	1 tahun						
	1.06.1.06.01.01.24.07	Peningkatan pelayanan PKH	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat				Buku data Penerimaan PKH	1 dok	Dukungan 16,57% terhadap capaian indeks pemberdayaan sosial	100 %	107,460,800	142,000,900		Dinas Sosial Dan PPPA

							Upaya pemberdayaan keluarga FDS (Family Develepmen Session) bagi KPM PKH)	4 kali						
							Terlaksannya Sosialisasi PKH	120 org						
							Koordinasi PKH	7 kali						
							Bintek graduasi PKH	203 org						
							Sosialisasi assessmen PKH graduasi	203 orang						
1.06.1.06.01.01.24.08	Peningkatan kapasitas PSKS	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Kab.Kulon Progo			Terlaksannya Lomba kreativitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)	1 kali	Dukungan 8.63% terhadap capaian indeks pemberdayaan sosial	100 %	55,966,100	82,005,000		Dinas Sosial Dan PPPA
							Terbinannya Lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS), wahana kesejahteraan sosial beerbasis masyarakat(WKSBM), Organisasi Sosial (Orsos), Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan(TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat(PSM), Kelompok usaha Bersama(KUBE), dan Karang Taruna	7 lembaga						
							Terfasilitasinya koordinasi PSKS	4 kali						
							terfasilitasinya PSKS dalam upacara Hari Kesetiakawanan Sosial	1 kali						
1.06.1.06.01.01.24.11	Peningkatan Pelayanan Bantuan Sosial Pangan	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat				Terlaksananya koordinasi dan Monev bantuan pangan	12 kali	Dukungan 12,47% terhadap capaian indeks pemberdayaan sosial	100 %	80,874,000	100,100,260		Dinas Sosial Dan PPPA
							laporan distribusi bantuan pangan	12 dok						
							Sosialisasi bantuan pangan	225 orgng						

								Bintek penyaluran bantuan pangan	130 org						
	1.06.1.06.01.01.24.12	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat				Dokumen data kemiskinan	1 dok	Dukungan 35,91% terhadap capaian indeks pemberdayaan sosial	100 %	232,878,700	-		Dinas Sosial Dan PPPA
								Verifikasi dan Validasi Basis data Terpadu	20500 Rumah Tangga						
								Bintek petugas verifikasi dan validasi data	102 org						
								koordinasi petugas verval data	12 kali						
V.	2.02.1.06.01.01.21-P	Program Perlindungan Sosial				Indeks Perlindungan Sosial	94.09%					14,112,904,300	1,215,323,450		
	1.06.1.06.01.01.25.01	Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat				Terfasilitasinya pendamping KPKD (kader penanggulangan kemiskinan Daerah) 88 orang	12 bln	Dukungan 98,88% terhadap capaian indeks perlindungan Sosial	100 %	13,954,200,500	1,215,323,450		Dinas Sosial Dan PPPA
								Tersosialisasikannya mekanisme pemberian bantuan (2 kali)	290 org						
								Pelayanan Sosial kepada PMKS	12 bln						
								Fasilitasi penyaluran Bansos PMKS	7 jenis						
								fasilitasi penyaluran bantuan sosial pangan non tunai	5000 rumah tangga						
						Kab.Kulon Progo		Bansos Bantuan Pangan Non Tunai	5000 kk						
						Kab.Kulon Progo		Bansos Bantuan bagi Psikotik	20 org						
						Kab.Kulon Progo		Bansos Kecelakaan Kerja Bagi Penderes Kelapa	37 kasus						

					Kab.Kulon Progo			Bansos Bagi Panti Asuhan dan Panti Jompo	23 panti						
					Kab.Kulon Progo			Bansos Bagi Anak Balita Terlantar	100 Anak						
1.06.1.06.01.01.25.02	Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat					Jumlah Korban Bencana yang dibantu	250 kk	Dukungan 0.97% terhadap capaian indeks perlindungan Sosial	100 %	137,399,700	-		Dinas Sosial Dan PPPA
								Terselenggarannya Apel siaga tagana	155 orang						
								Operasional Posko Siaga Tagana	12 bin						
								Terlaksannya sosialisasi KSB	80 orang						
								Terlaksannya bimbingan teknis Tagana dan KSB	300 orang						
								upacara Hari Pahlawan	1 kali						
1.06.1.06.01.01.25.03	Penjangkauan dan Pelayanan Sosial	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat					Terlayannya PGOT(Pengemis,Gelandangan,Orang Terlantar yang dilayani)	12 bulan	Dukungan 0,15% terhadap capaian indeks perlindungan Sosial	100 %	21,304,100	-		Dinas Sosial Dan PPPA
2.02.1.06.01.01.21	Program Peningkatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender											102,391,600	85,355,690		
2.02.1.06.01.01.21.01	Pemberdayaan lembaga berbasis Gender	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat					Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender	1 dok	Dukungan 29.06 % terhadap cakupan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	100 %	29,757,700	37,565,290		Dinas Sosial Dan PPPA

							Terfasilitasinya koordinasi GOW	12 kali						
							Terlaksananya sosialisasi berpolitik untuk perempuan	65 org						
2.02.1.06.01.01.21.02	Peningkatan Peran Wanita	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat				Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan desa prima	40 org	Dukungan 24.45 % terhadap cakupan pemberdayaan perempuan dan pengaruutamaan gender	100 %	25,034,200	0		Dinas Sosial Dan PPPA
							Terbinanya kelompok P2WKSS	1 kali/lomba						
2.02.1.06.01.01.21.03	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat				Ekspos hasil karya kaum perempuan	1 kali	Dukungan 16.52 % terhadap cakupan pemberdayaan perempuan dan pengaruutamaan gender	100 %	16,915,900	0		Dinas Sosial Dan PPPA
2.02.1.06.01.01.21.08	Penguatan Pengarusutamaan Gender	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat				Tersusunnya profil pengarusutamaan gender	1 dok	Dukungan 29.97 % terhadap cakupan pemberdayaan perempuan dan pengaruutamaan gender	100 %	30,683,800	47,790,400		Dinas Sosial Dan PPPA
							Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG	26 orang						
							Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA	1 dokumen						
							Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan	1 dokumen						
							Terbentuknya desa sadar gender	7 desa						
					Kab.Kulon Progo		Upacara Peringatan Hari Kartini	1 kali						

2.02.1.06.01.01.22-P	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak					Indek Perlindungan Perempuan dan Anak	88.86					340,435,200	244,874,335		
2.02.1.06.01.01.22.01-P	Pembinaan Kabupaten Layak Anak	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat					Terlaksananya pelatihan konvensi hak anak	100 orang	Dukungan 59.27 % terhadap cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	100 %	201,780,100	244,874,335		Dinas Sosial Dan PPPA
								Terlaksananya pembinaan kabupaten layak anak	12 kali						
								Terevaluasinya kabupaten layak anak	1 dok						
								Terfasilitasinya Peringatan Hari Anak	1 kali						
								Tersusunnya kebijakan tentang pengembangan KLA	1 perbup						
					desa			Pembinaan desa layak anak	12 desa						
					kabupaten			Terfasilitasi forum anak kabupaten	3 kali						
					kabupaten			Terfasilitasinya forum anak kecamatan	12 kali						
					kabupaten			Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah di keluarga miskin	370 anak						
					kabupaten			Evaluasi dan monitoring PMTAS	21 kali						
					kabupaten			Pembinaan kecamatan layak anak	12 kali						
2.02.1.06.01.01.22.05	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat					Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	36 orang	Dukungan 40.73 % terhadap cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	100 %	138,655,100			Dinas Sosial Dan PPPA

							Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan	12 bln						
							rapat Koordinasi pendampingan perempuan dan korban kekerasan	25 kali						
							Operasional P2TP2A	12 bln						
							Terkoordinasikannya FPKK tingkat kabupaten dan kecamatan 13 forum	15 kali						Dinas Sosial Dan PPPA
							Tersosialisasikannya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	110 orang						